

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Penelitian ini dilakukan berdasarkan peristiwa yang terjadi pada 20 Maret 2003 ketika Amerika Serikat memutuskan untuk melakukan invasi atas Irak meskipun ditentang oleh masyarakat internasional bahkan oleh Dewan Keamanan PBB. Invasi ini merupakan fenomena penting bagi hubungan internasional mengingat banyak orang berharap pasca Perang Dingin akan terwujud perdamaian internasional tetapi yang terjadi justru intensitas perang khususnya di Timur Tengah yang terus meningkat. Situasi ini pernah terjadi menjelang abad 20 ketika banyak orang berharap dengan penuh optimisme akan terwujud perdamaian dunia setelah diselenggarakannya Konferensi Perdamaian Internasional di Den Hague pada tahun 1899 dan 1907 setelah Eropa mengalami banyak perang antara tahun 1848-1870. Tetapi yang terjadi justru Perang Dunia I dan Perang Dunia II yang melibatkan hampir semua Negara Eropa, Rusia (Uni Soviet), Amerika, dan Jepang, serta mempunyai dampak terhadap hampir semua negara di seluruh peta bumi.

Peristiwa ini diduga akan mempunyai implikasi negatif pada hubungan internasional di wilayah regional Timur Tengah. Implikasi negatif yang dimaksud ialah ; Pertama, invasi tersebut akan memperkuat dominasi Amerika di wilayah Timur Tengah sehingga akan mengganggu *Balance of Power* di wilayah tersebut. Kedua, Invasi Amerika atas Irak akan menyebabkan ketidakstabilan politik

khususnya; Ketiga, pendudukan Amerika atas Irak akan menyulitkan integrasi negara-negara Arab sehingga ide terbentuknya Pan-Arabisme semakin sulit diwujudkan. Keempat, invasi tersebut merupakan pelanggaran atas Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) terutama mengenai penghormatan terhadap kedaulatan (sovereignty) dan prinsip *non-intervention*; Kelima, Invasi tersebut merupakan fenomena bentuk imperialisme baru, mengingat kehadiran Amerika Serikat di Irak yang tidak terbatas baik waktu maupun tingkat keterlibatannya; Keenam, dengan implikasi dari satu hingga enam tersebut akan berpengaruh negatif terhadap proses perdamaian Arab-Israel karena akan semakin memperkuat eksistensi Israel dan mengabaikan harapan terbentuknya negara Palestina merdeka.

Penyerangan Amerika Serikat atas Irak mempunyai tujuan jangka panjang yang akan mempengaruhi peta politik, militer, dan ekonomi Amerika Serikat di Timur Tengah khususnya, dan diperbatasan dunia Internasional pada umumnya.

Ada apa dengan Irak? Mengapa Amerika menyerang Irak, meskipun dengan menghabiskan dana miliaran dolar? Berbagai jawaban atas pertanyaan di atas telah ada di otak para pengamat politik dan ekonomi internasional. Mereka menyatakan bahwa penyerangan Amerika dan Inggris atas Irak bukan hanya sekadar membasmi senjata terlarang (nuklir, kimia, dan biologi) Irak.

Irak merupakan negara kaya penghasil minyak yang bermutu tinggi. Ia termasuk negara penghasil minyak terbesar di dunia yang menduduki peringkat kedua setelah Arab Saudi. Terletak di sebuah lembah subur Mesopotamia lama,

yang membujur dari Afghanistan sampai ke Kosovo guna membendung gerak maju Rusia dan Uni Eropa. Irak juga menjadi ancaman utama Negara Israel (anak emas Amerika di Timur Tengah yang harus dilindungi).

Sebenarnya penyerangan dan pendudukan atas Irak tidak lain hanyalah sebagai awal dari periode Perang Dingin baru yang belum dapat dikatakan berakhir, sesuai dengan sudut pandang Amerika. Amerika menginginkan agar semua kekuatan senjata dan nuklir setiap negara musuh yang mengancamnya harus dilumpuhkan. Amerika tidak hanya puas menduduki sebagai posisi negara super power dan pimpinan semua negara kuat, namun yang ia inginkan adalah agar ia menjadi pemeran tunggal dan pemegang keputusan dunia untuk menguasai dunia secara sempurna dengan memperalat konsep globalisasi dan tatanan dunia baru.

Pada langkah pertama mereka telah sukses, yaitu menciptakan Amerikanisasi dalam segala bidang dan “meruntuhkan” PBB dengan cara memandulkan peranannya sebagai majelis tertinggi dunia. Sesuai dengan konsep ini, Irak pada hakekatnya bukanlah tujuan utama dari penyerangan ini, nasibnya seperti Afghanistan dan Kosovo. Jadi, Irak hanyalah sebagai kendaraan politik dan militer untuk mengepung Rusia dan Uni Eropa dengan deretan “sabuk pengaman” yang terdiri dari Afghanistan, Irak, Turki, dan Israel. Maka, begitu Amerika berhasil membuat “persekutuan Amerika” bersama negara-negara yang berada di sekitar Eropa dan Rusia tersebut, ditambah dengan pengawasan penuh

akan masuk dalam “perangkap”. Uni Eropa tidak akan mempunyai kekuatan apa-apa setelah Amerika berhasil mewujudkan strategi ini.

Invasi yang ditujukan untuk mendorong proses demokrasi di negara itu sangatlah tidak masuk akal. Karena justru cara-cara yang digunakan Amerika sangatlah tidak demokratis.

Penelitian mengenai prospek demokratisasi di Irak pasca invasi menjadi sangat penting untuk ditelaah secara lebih mendalam untuk memahami bahwa demokrasi itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, bukan merupakan sesuatu yang diberikan oleh Tuhan (given). Untuk itu, diperlukan waktu yang lama sehingga nilai-nilai demokrasi yang diperjuangkan menginternal dalam suatu masyarakat.

Oleh karena itu, harapan bahwa demokrasi akan lahir atau tercipta segera setelah Saddam dijatuhkan tidak mempunyai landasan empiris yang memadai dan cenderung naif. Demokrasi adalah sebuah proses, dan berhasil atau tidaknya proses tersebut sangat ditentukan oleh dialektika antar berbagai faktor yang terlibat dalam proses tersebut.

Namun yang menjadi soal adalah apakah benar AS dapat diharapkan untuk mengambil peran yang besar, dan secara jujur membantu negara ini dalam proses demokrasiya?. Oleh karena itu, mengharapkan peran AS untuk secara jujur turut membangun demokrasi di Irak adalah sangat sulit. Ini karena yang menjadi soal adalah bukan persoalan demokratis ataukah tidak rejim tersebut, tetapi lebih pada apakah ia menjadi “pengikut” yang baik bagi AS. Hal inilah yang kemudian

sehingga penulis mencoba untuk mengangkat masalah tersebut sebagai topik dalam skripsi ini.

B. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan prospek demokratisasi di Irak pasca invasi, khususnya masa depan demokrasi Irak dibawah pemerintahan transisi bentukan AS. Serta sebagai pembulat studi untuk syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Irak terletak di sebuah kawasan yang subur, yaitu lembah Sungai Euphrat dan Tigris, tepatnya disebut dengan Mesopotamia Kuno. Pada zaman kuno, Irak juga dikenal dengan sebutan Lembah Babilonia. Kawasan Irak menyimpan pelbagai masa gemilang dan sampai sekarang terus disenandungkan oleh para budayawan, seniman, dan ilmunan; mulai dari peradaban kuno Mesopotamia; Babilonia dengan taman gantungnya; dan Baghdad sebagai kota seribu satu malam Harun ar-Rasyid.

Irak terletak di sebelah Barat Daya Asia. Negeri itu mempunyai pantai di Teluk sepanjang 30 km atau 13 mil, dan hanya mempunyai sebuah pelabuhan kecil di Ummu Qashr. Dengan demikian negara ini termasuk tipe daratan tertutup.

sebelah utara berbatasan dengan Yordania dan Syiria. Adapun bagian selatan Irak, dulu dikenal dengan sebutan Al-Jazira yang bergunung-gunung.

Irak berpotensi menjadi sebuah negara terkaya di dunia, karena cadangan minyak bumi (nomor dua terbesar di dunia) dan gas alamnya yang melimpah. Sebelum menginvasi Iran pada tahun 1980, tidak kurang dari 95% nilai ekspor Irak bersandar pada minyak. Irak mempunyai air yang banyak, karena adanya suplai air dari dua sungai utama, yaitu Tigris dan Euphrat. Oleh karena itu bangsa Yunani Kuno menyebutnya dengan Mesopotamia (daerah yang terletak diantara dua sungai). Pada zaman dahulu, kedua sungai itu dihubungkan oleh kanal-kanal dan sistem irigasi. Adapun pada zaman modern, peranan irigasi tersebut masih tetap penting. Pemerintahan Irak telah membangun beberapa waduk di sungai Tigris dan Euphrat untuk irigasi dan pengontrol banjir. Banyak system irigasi tersebut sengaja dihancurkan oleh pasukan multinasional pimpinan AS pada 1991 dan 2003 untuk melemahkan Irak.

Invasi militer Bush ke Irak yang ditujukan untuk mendorong proses demokratisasi di negara itu, mengukuhkan pandangan sementara penulis bahwa seringkali terjadi usaha-usaha untuk membangun suatu sistem politik demokratis digunakan cara-cara yang justru tidak demokratis. Terlepas dari kontroversi yang kini tengah berkembang, menyangkut motivasi dan legalitas invasi militer tersebut ke Irak, peristiwa ini memunculkan sejumlah paradoks.

Agresi militer ini ditujukan, sesuai dengan namanya "Operation Iraki Freedom" adalah dalam rangka membebaskan rakyat Irak dari Rejim Saddam

digunakan oleh para pemimpin yang otoriter dan fasis. Di negara-negara fasis dan otoriter seperti Orde Baru era Soeharto, kekerasan dan kekuatan militer digunakan untuk membungkam suara-suara kritis dalam masyarakat.

Militer digunakan semata-mata untuk menjamin dan melanggengkan kekuasaan politik rejim. Oleh karena itu, ketika agresi militer digunakan untuk memenumbangkan rejim yang otoriter dan despotis maka ia menjadi kontra produktif. Perlu dicatat, bahwa demokrasi seringkali hanya dijadikan alat untuk melanggengkan kepentingan tertentu. Dengan kata lain, usaha Amerika untuk mendorong proses demokratisasi di Irak, bisa jadi tidak ditujukan untuk mendorong secara sungguh-sungguh kawasan itu menjadi wilayah demokratis yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, namun lebih dalam konteks bagaimana kepentingan Amerika di kawasan tersebut tidak terancam.

Sementara itu menurut catatan Thantowi bahwa berbagai pengalaman menyangkut usaha-usaha AS untuk menjatuhkan rejim diktator secara paksa, seperti Grenada, Panama, Haiti, dan Afganistan, mengindikasikan kehidupan sosial pasca-invasi tetap tidak mengalami peningkatan yang berarti¹. Dengan kata lain, negara-negara tersebut sedikit sekali mengalami kemajuan dalam kehidupan demokrasi mereka. Untuk mendukung preposisi ini Thantowi mengambil contoh Afganistan, kehidupan sosial politik demokrasi di wilayah ini sejak Hamid Kharzai berkuasa juga tidak mengalami kemajuan yang berarti jika dibandingkan dengan masa pemerintahan Taliban.

¹ Lihat tulisan Pramono U. Thantowi, dalam *Harian Kompas*, "Invasi ke Irak dan Demokratisasi

Fakta ini sengaja ditampilkan agar kita tidak terjebak pada harapan yang berlebihan terhadap peran AS dalam mendorong proses demokratisasi di Irak. Karena meskipun Amerika akan membantu proses demokratisasi di wilayah ini, maka tetap tidak bias dilepaskan dari kepentingan geopolitiknya. Sebaliknya, proses demokratisasi hendaknya lebih dilihat dalam konteks internal masing-masing negara, terutama menyangkut suprastruktur dan infrastruktur demokratis yang mendukungnya. Ini berarti bahwa meskipun pihak luar mempunyai peran dalam proses demokratisasi di Irak, namun peran ini tidak akan banyak berarti jika kondisi internal tidak mendukung proses itu. Salah satu faktor yang mempunyai peran besar dalam mendorong demokratisasi tersebut adalah budaya politik dan pembangunan ekonomi.

Invasi Amerika Serikat dikatakan berakhir ketika Baghdad jatuh dibawah kekuasaan pasukan koalisi pada 8 April 2003 ditandai dengan didudukinya istana Kepresidenan Saddam Husein. Jika tujuan dari penyerangan Amerika dan Inggris ke Irak untuk menggulingkan Saddam Husein serta menghancurkan senjata pemusnah massal Irak yang diduga oleh Amerika masih disimpan Saddam maka jelas dua tujuan tersebut tidak tercapai. Akan tetapi kalau tujuannya untuk memporakporandakan Irak khususnya kota-kota penting seperti Baghdad, Mosul, Nasiriyah, dan Tikrit, serta untuk mendisintegrasikan Irak yang berpenduduk heterogen, serta untuk menyengsarakan dan menyiksa rakyat Irak agar di lain waktu siapapun pemimpin Irak jangan mencoba berani dengan Amerika, maka

mengalami ketidakstabilan politik yang parah dari sebelumnya yang selanjutnya akan menghambat proses demokratisasi di Irak.

Banyak pengamat menilai bahwa invasi yang dilakukan oleh Amerika tidak sah, dan karenanya dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk invasi ataupun penjajahan (kolonialisme). Penunjukan Paul D Bremer sebagai administrator di Irak dapat dianggap sebagai suatu model pemerintahan kolonial. Selain itu, adalah tidak dibenarkan, suatu negara dengan alasan apapun menyingkirkan suatu pemimpin negara lain dengan menggunakan angkatan perang meskipun pemimpin tersebut otoriter dan despotis. Ini karena warga negara dari bangsa tersebutlah yang lebih mempunyai hak untuk menurunkan pemimpin mereka dari tampuk pemerintahan. Di sisi lain, invasi ini juga tidak mendapatkan legitimasi dari DK PBB setelah usaha-usaha yang dilakukan Amerika Serikat untuk mendapatkan dukungan di badan internasional tersebut tidak mendapatkan hasil. Sebagian besar negara-negara besar di DK PBB menolak rencana invasi tersebut, dan mereka menyarankan agar permasalahan Irak diselesaikan dengan jalan damai untuk menghindari bencana kemanusiaan. Ini sebagaimana diungkapkan oleh Menlu Jerman, Joschka Fischer yang negaranya memimpin DK PBB saat ini, "tugas kami sekarang adalah melakukan segala sesuatu yang dapat kami lakukan untuk menghindari bencana kemanusiaan."² Namun pada akhirnya, dengan tanpa dukungan DK PBB, Amerika Serikat tetap melancarkan invasi ke Irak.

Masalah berikutnya yang sering mendapatkan perhatian dan dengan demikian menimbulkan diskusi di kalangan pengamat adalah menyangkut

² *Tempo Interaktif*, 20 Maret 2003.

motifasi Amerika Serikat melakukan invasi ke Irak. Kuatnya keinginan George Walker Bush untuk menginvasi Irak dan menurunkan Saddam Husein dari tampuk pemerintahan dengan tanpa dukungan DK PBB telah menimbulkan spekulasi menyangkut motivasi Amerika Serikat di belakang aksi tersebut. Dalam diskusi panel yang diselenggarakan oleh The Middle East Policy Council (MEPC) pada tanggal 20 Juni 2003 di Washington DC, Presiden MEPC, Chas Freeman, menyatakan bahwa setidaknya ada enam alasan George W Bush melakukan invasi ke Irak, yakni³: *pertama*, penghancuran program senjata pemusnah masal (mass weapon destruction). Ini menjadi salah satu alasan yang paling sering dikatakan Bush untuk melakukan invasi. Program pengembangan senjata pemusnah massal Saddam Husein dianggap sebagai ancaman bagi Amerika Serikat, dan dunia. Oleh karena, dalam rangka membongkar program pemusnah masal tersebut satu-satunya jalan adalah dengan serangan militer karena Saddam dianggap kurang kooperatif dengan tim inspeksi PBB.

Menurut intepretasi Bush, penggunaan kekuatan militer untuk menghancurkan program senjata masal tidak menyalahi hukum internasional. Ini karena hukum internasional membenarkan penggunaan kekerasan bersenjata dalam tiga hal, yaitu untuk pertahanan diri (*self defense*), untuk pelaksanaan ketentuan Bab VII Piagam PBB (*enforcement action*), dan walaupun masih diperdebatkan, untuk intervensi kemanusiaan (*humanitarian intervention*)⁴. Pengembangan senjata pemusnah masal Irak dianggap sebagai ancaman bagi AS

³ Kutipan ini diambil dari tulisan Raha Rafii, "Iran Influencelin Irak Debated Congress," dalam [http:// www.iraniantrade. Org / update/news.asp?Id=2673](http://www.iraniantrade.Org/update/news.asp?Id=2673).

⁴ Heribertus Jaka. Triyana (2003), "Stabilitas Irak Pasca Konflik," artikel di-download dari <http://www.acpml.org/documents/paper Jaka.rtf>

dan karenanya harus dihancurkan berdasarkan interpretasi paradigma pertahanan baru, yakni *pre-emptive self defense*. Hingga saat ini, klaim Bush mengenai kepemilikan senjata pemusnah massal masih menimbulkan perdebatan dikalangan pengamat dan politikus. Bahkan, Perdana Menteri Inggris Tony Blair sebagai pendukung kuat invasi Bush ke Irak menuai kritik pedas dari dalam negerinya, dan kredibilitasnya menurun drastis.

Kedua, perubahan rezim. Saddam Husein dalam pandangan Presiden Bush dianggap sebagai pimpinan yang otoriter. Oleh karena itu, setelah berbagai usaha melalui kelompok oposisi, bahkan mungkin juga dengan operasi intelijen telah gagal menjatuhkan Saddam dari kekuasaannya maka invasi militer menjadi satu-satunya jalan. *Ketiga*, demokratisasi. Operasi Amerika Serikat di Irak diberi nama *Operation Iraqi Freedom*. Ini berarti bahwa invasi Amerika tersebut ditujukan untuk membebaskan rakyat Irak dari rejim otoriter Saddam Husein. Dengan kata lain, invasi ini ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis pasca Saddam. *Keempat*, perbaikan kehidupan rakyat Irak. Setelah mengalami embargo ekonomi sejak kekalahannya dalam perang Teluk tahun 1991, kehidupan masyarakat Irak semakin memprihatinkan. Oleh karena itu, dalam rangka membangun kembali Irak pasca invasi dan dalam rangka memperbaiki kehidupan rakyat Irak, Amerika telah menyediakan dana sebesar 8 miliar dollar untuk pembangunan kembali Irak⁵. *Kelima*, menghancurkan kegiatan terorisme internasional. *Keenam*, transformasi wilayah Timur Tengah dibawah pengawasan Amerika Serikat.

⁵ *Tempo Interaktif*, 4 April 2003.

Sementara itu, M. Solihat (2003)⁶ menyatakan bahwa setidaknya ada tiga hal yang mendorong Amerika melakukan invasi ke Irak. *Pertama*, kepentingan geopolitik AS dikawasan Timur Tengah. Untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan yang kerap tidak stabil itu AS membutuhkan teman, yang dalam hal ini diidentikan dengan Israel, yang juga punya kepentingan sama. Oleh karena itu, AS selalu berupaya melindungi Israel dari ancaman-ancaman negara-negara lain di Timur Tengah, khususnya Irak. Selama Perang Teluk berlangsung, setidaknya Israel telah beberapa kali menjadi sasaran rudal-rudal yang dilancarkan oleh Saddam, dan dalam konteks ini Amerika telah menjadi "dewa" penyelamat yang baik bagi Israel dengan menempatkan rudal-rudal anti di kawasan tersebut. Oleh karena itu, jika kekuatan Saddam dibiarkan berkembang, maka di masa yang akan datang akan membahayakan Israel, dan tentunya juga Amerika. *Kedua*, perang tersebut berkait dengan kepentingan minyak. AS hanya mempunyai cadangan minyak yang sangat kecil, yakni sekitar 0,3% dari cadangan minyak dunia, sedangkan kebutuhan konsumsi minyak AS mencapai 23%. Di sisi yang lain, Arab Saudi yang mempunyai cadangan minyak terbesar di dunia sudah tidak mulai akomodatif lagi terhadap kepentingan-kepentingan AS. Ini tentu saja akan mengancam pasokan energi AS dimasa akan datang, dan akan mengganggu kinerja industrinya. Oleh karena itu, AS berusaha untuk mengamankan kepentingan minyaknya dikawasan ini. Kuatnya kepentingan AS untuk menguasai minyak dikawasan ini juga pernah dilontarkan oleh Chomsky dan Albert (1991) ketika Bush memaksa pasukan Saddam keluar dari Kuwait.

⁶ M. Solihat (2003), *Amerika dan Pilihan "Jalan Perang,"* dalam <http://www.cides.or.id/politik/pk0013033.asp>.

Ketiga, perang ini berhubungan dengan ambisi AS sebagai negara terkuat di dunia yang tidak ingin setiap kepentingannya dihambat oleh siapapun, termasuk sebuah rezim yang berkuasa. Oleh karena itu, segala hal yang menurut persepsi AS mengandung potensi ancaman akan selalu diberangusnya.

Sebenarnya motivasi dibalik invasi Amerika ke Irak dapat diidentifikasi dengan baik jika kita mampu menganalisa perkembangan politik luar negeri pasca Perang Dingin, dan situasi dalam negeri Amerika. Kaufman, Mckitrick dan Leney(1995) menyatakan bahwa politik luar negeri Amerika Serikat mempunyai banyak dimensi. Diantara dimensi-dimensi tersebut yang paling penting dan utama menurut mereka adalah dalam dimensi kebijakan politik/diplomasi, kebijakan ekonomi, dan militer dengan lebih menitikberatkan pada keamanan internasional.⁷

Suatu negara akan dianggap sebagai ancaman bagi Amerika Serikat jika negara tersebut mampu mengembangkan kemampuan ekonomi dan keunggulan industri, terutama industri militer. Tentunya, ini juga harus dilihat dalam konteks apakah negara tadi mendukung kepentingan Amerika Serikat⁸ ataukah tidak? Dalam banyak kasus, ketika suatu negara mendukung kepentingan Amerika maka

⁷ Lihat Hasnan Habib (1994), "*Amerika dan Stabilitas Dunia*", dalam Hasnan Habib(1997), *Kapita Selekta: Strategi dan Hubungan Internasional* (Jakarta: CSIS), hal.514.

⁸ Kepentingan nasional Amerika telah digariskan dalam Preambul dari konstitusi Amerika Serikat, yakni: mengupayakan kesatuan dan persatuan yang lebih sempurna; keadilan; ketenangan dan kedamaian domestik; pertahanan yang memadai; kesejahteraan ekonomi; dan berkah yang diberikan oleh ebebasan, tidak hanya oleh generasi sekarang, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Nilai-nilai dasar itu hanya bisa direalisasikan jika negara dan bangsa dapat eksis berkesinambungan dalam lingkungan yang aman dan damai, sehingga kemerdekaan, integritas wilayah, lembaga-lembaga yang fundamental, dan suatu tingkat kehidupan politik, ekonomi, sosial,

yang dilakukan adalah sebaliknya, yakni mendorong perkembangan ekonomi dan industri negara-negara tersebut.

Kita dapat memahami mengapa Amerika Serikat sangat memusuhi Korea Utara, Iran dan Irak. Ini karena dalam pemahaman para pejabat Gedung Putih, negara-negara tersebut mengembangkan sistem persenjataan yang bisa mengancam Amerika, disamping juga negara-negara ini sangat tidak akomodatif terhadap kepentingan Amerika Serikat di masing-masing kawasan. Menyebut ketiga negara ini sebagai “axis of evil” menjadi cermin dari implementasi kekuatan Amerika menyangkut perkembangan teknologi persenjataan di ketiga negara ini.

Seringkali terjadi bahwa kepentingan Amerika terancam oleh negara-negara yang tidak se-ideologis. Oleh karena itu, menyebarkan ideologi Amerika, yang dalam hal ini adalah demokrasi dan liberalisme ekonomi menjadi suatu kewajiban. Program ini telah dimulai sejak masa Perang Dingin, dan nampaknya terus berlangsung hingga saat ini. Dengan demikian, salah satu tujuan invasi Amerika Serikat untuk mendorong terjadinya proses demokratisasi di Irak dapat dilihat dalam konteks ini. Bagaimanapun, agresi militer Amerika ke Irak tetap harus dilihat sebagai pelanggaran kedaulatan negara bangsa, dan merupakan ancaman bagi demokrasi dan perdamaian itu sendiri di masa datang. Sebagaimana ditegaskan oleh William K. Tabb, pilihan AS pada ancaman dan penggunaan

... ..

hal semacamnya, tetapi berkaitan erat dengan siapa yang bekerjasama dan siapa yang tidak bekerjasama⁹.

Keberhasilan Amerika mewujudkan keinginannya untuk menyerang Irak dengan mengabaikan legalitas dari Dewan Keamanan PBB serta ketidaksetujuan negara-negara anggota G-7 seperti Perancis dan Jerman menunjukkan bahwa negara tersebut memang Superpower yang belum ada tandingannya. Lebih lanjut penyerangan itu berakhir dengan “penguasaan” atas wilayah yang diserangnya sehingga melengkapi atribut dirinya sebagai negara adidaya tunggal dunia.

Langkah utama negara adidaya ini untuk menunjukkan keadidayaannya ialah dengan mengangkat Jay Garner sebagai Ketua Kantor Rekonstruksi dan Bantuan Kemanusiaan Amerika di Irak sekaligus administrator yang bertugas untuk membentuk pemerintahan Irak sesuai dengan keinginan Amerika. Jay Garner menjanjikan pemerintahan Irak yang demokratis sudah akan terbentuk akhir bulan Mei 2003.¹⁰ Bagaimana mungkin akan membentuk pemerintahan yang demokratis jika cara-cara yang digunakan justru jauh dari kategori demokratis.

Jika dunia internasional khususnya PBB tidak menentang kebijakan Amerika membentuk pemerintahan di Irak maka hampir dapat dipastikan tidak akan dapat terwujud pemerintahan demokratis dan legitimate di Irak sehingga negeri Babylon ini akan terus menerus dilanda ketidaktabilan politik. Lebih parah lagi Amerika akan terus melenggang tanpa control siapapun terhadap negara-negara Timur Tengah lain khususnya tetangga Irak seperti Suriah dan Iran.

Setelah rezim Saddam jatuh ada kecenderungan kuat bahwa Amerika akan kesulitan membangun pemerintahan baru yang demokratis. Hal ini disebabkan oleh: pertama, prinsip Amerika sendiri tidak demokratis melainkan hanya berdasarkan kepentingan politiknya yaitu mencegah munculnya penguasa yang menentang kekuasaan Amerika dan atau yang berafiliasi dengan negara yang menjadi musuh Amerika.

Kedua, sebagian besar para calon pemimpin Irak pilihan Amerika ini tidak mempunyai basis pendukung yang kuat dengan rakyat Irak. Tokoh-tokoh tersebut misalnya, Ahmad Chalabi, pemimpin Kongres Nasional Irak (Iraqi National Congress) yaitu organisasi warga Irak di pengasingan yang didukung oleh Amerika Serikat dan Inggris, atau Sharif Ali Bin Al Husein yang menjadi pemimpin Gerakan Monarki Konstitusional yang merupakan saudara sepupu raja Faisal II sementara sebagian besar rakyat Irak menolak kembalinya system kerajaan. Sedangkan tokoh Kurdi Massoud Barzani (KDP) dan Jalal Talabani (PUK) hanya diterima dikalangan suku Kurdi saja. Lebih parah lagi kedua tokoh ini selalu diwarnai konflik dan masing-masing pihak mempunyai pengikut. Amerika hanya mendukung yang kira-kira menguntugkan kepentingannya. Pasca Perang Teluk II Amerika cenderung mendukung Massoud Barzani, sedangkan sekarang cenderung mendukung Jalal Talabani arena kecewa dengan Barzani yang pernah berkompromi dengan Saddam Husein.

Kalau prinsip demokrasi ditegakkan akan ada kecenderungan kuat bahwa kaum Shiah akan berkuasa karena mayoritas penduduk Irak. Akan tetapi

ditunjukkan ketika mereka melakukan konvoi di Karbala untuk mengenang Imam Hussein, tokoh Shiah dan cucu Nabi Muhammad SAW. Berulang kali George Walker Bush memperingatkan Iran agar tidak mengirimkan orang-orang Iran ke Irak Utara untuk mempengaruhi penduduk Shiah. Agar Iran mengindahkan peringatan ini Amerika mengirimkan pasukan marinirnya pada Rabu 23 April lalu di perbatasan Irak-Iran. Paling tidak ada tiga faksi utama Shiah dukungan Iran yang sangat potensial melawan kehadiran Amerika Serikat dan sekutunya di Irak yaitu; Jamaah al Ulama, Dewan Tinggi Revolusi Islam Irak, dan Partai Dakwah Islam. Amerika akan sangat sulit mematikan kelompok ini mengingat mereka sudah sangat terorganisir dan mempunyai cabang hampir di seluruh negeri.

Gambaran situasi tersebut diatas menunjukkan bahwa Irak pasca invasi akan mengalami problem disintegrasi yang parah daripada sebelum invasi karena campur tangan Amerika yang transparan. Siapapun yang akan dipilih oleh Amerika hampir dapat dipastikan tidak akan diterima oleh kelompok lain. Integrasi hanya akan terwujud dengan kekerasan senjata, kekuatan finansial, tokoh yang disegani yang didukung secara total oleh Amerika Serikat. Akibatnya Irak akan berubah wajah seperti halnya Yordania; menjadi negara yang tidak peduli dengan nasib bangsa Palestina dan mendukung eksistensi Israel, sangat dekat dengan Inggris dan Amerika sehingga atribut negara radikal akan berubah menjadi negara yang moderat.

D. Rumusan Masalah

“Dampak Integrasi di Irak pasca invasi AS?”

E. Kerangka Dasar Teori

Untuk membahas permasalahan diatas, akan digunakan konsep Demokrasi, Demokratisasi, dan Aspek-aspek Internasional Demokratisasi, yang penjelasannya sebagai berikut:

a. Demokrasi dan Demokratisasi

Perkataan demokrasi berasal dari dua pokok kata Yunani yaitu “demos” (rakyat) dan “kratein” (memerintah) yang maksudnya adalah “cara memerintah negara oleh rakyat”¹¹. Sementara demokratisasi adalah perubahan dari rezim non demokratis menjadi demokratis. Ciri-ciri utama proses ini adalah terjadinya pergeseran dari rezim otoriter yang membangun sistem hegemonik tertutup, yang tidak memberi ruang partisipasi publik kearah sistem politik yang lebih terbuka, lebih demokratis. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat dan memberikan jaminan atas hak asasi manusia serta kebebasan kepada masyarskatnya tanpa membedakan suku, ras, agama, dan golongan.

Bagaimana mungkin akan terbentuk negara yang demokratis kalau cara-cara yang digunakan Amerika jauh dari kategori demokratis. Kalau secara garis besar demokrasi didefinisikan sebagai pemerintahan yang berdasarkan kehendak rakyat (mayoritas) maka pembentukan pemerintahan Irak yang baru berdasarkan kehendak Irak justru menunjukkan bahwa pemerintahan Irak yang baru jauh dari negara demokrasi. Mayoritas rakyat Irak berbangsa Arab dan 60% nya beragama islam Shiah tetapi Amerika justru mencegah munculnya penguasa Shiah karena

¹¹ *Demokrasi dan Demokratisasi*, G. D. S. (1997), Demokrasi Eropa Banding 1997

dianggap mempunyai kedekatan dengan Iran yang merupakan musuh bebuyutan Amerika sejak Revolusi Islam Iran 1979. Amerika bahkan mengancam akan menangkap siapa saja yang berani menentang kekuasaan Amerika.¹²

Maurice Duverger mengungkapkan penelitian dalam karya *Le Regimes Politiques* (1945)¹³ yaitu cara pemerintah dimana golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah adalah sama dan tidak terpisah-pisah. Duverger cenderung melihat demokrasi sebagai konsep yang mengakui persamaan hak dan kedudukan setiap individu dalam masyarakat. Pemerintah yang demokratis dalam hal ini terdiri dari orang-orang yang dipilih oleh rakyat secara bebas atas kehendak murni mereka untuk menjadi pemimpin dan melaksanakan aspirasi mereka.

Dengan demikian, demokrasi paling tidak memiliki tiga pilar besar, yaitu hak berpartisipasi dalam keputusan pemerintah dengan memberikan suara, hak untuk diwakili dan hak oposisi yang terorganisasi untuk menentang pemerintah melalui pemilu maupun parlemen.¹⁴

Dari penjelasan konsep demokrasi diatas dan dengan melihat fenomena yang terjadi dapat diambil suatu acuan bahwa sejak pemerintahan Saddam hingga sekarang Irak mengalami berbagai hambatan menuju sebuah negara yang demokratis. Bahkan jauh dari sistem demokrasi yang ideal, untuk menciptakan sebuah negara yang demokratis haruslah melibatkan partisipasi efektif dari rakyat agar supaya segala tuntutan dan dorongan dari rakyat untuk dilibatkan dalam

¹² Situs The New York Times dalam *Republika* 25 April 2003.

¹³ Ibid.

¹⁴ Robert A. Dahl, *Government and Political Opposition* dalam Fred I. Greenstein and Nelson W.

suatu pengambilan keputusan politik bisa tercapai sehingga keputusan politik tidak hanya berada ditangan perdana menteri, presiden, dan militer.

Irak merupakan negara dimana untuk mencapai keberhasilan dalam demokratisasinya harus menghadapi masalah yang kompleks, yang menyangkut lingkungan sosial dan ekonominya yang dipengaruhi Amerika Serikat yang terus berlangsung dalam kehidupan politik nasional maupun regional. Sementara itu pemilu dan institusi demokrasi lainnya tidak mampu menciptakan demokrasi karena adanya dominasi oleh Amerika Serikat.

Dalam proses demokrasi yang terjadi di Irak setelah jatuhnya rezim Saddam, tidak terlihat beberapa persyaratan penting dan pilar utama dalam kehidupan menuju demokratisasi. Hal tersebut dapat terlihat dari sikap arogan AS pasca invasi Irak berencana membentuk pemerintahan transisi yang sebenarnya adalah pemerintahan boneka. Salah satu calon kuat yang akan diajukan adalah Jenderal Nizar al-khazraji, mantan kepala Angkatan Darat Irak.

Sebelumnya, media terkemuka Inggris, The Guardian, melaporkan setiap Kamis pagi, lingkaran dalam Pemerintahan George W. Bush memang rapat di Ruang Oval, Gedung Putih. Penasihat Keamanan Nasional Condoleezza Rice, Menteri Luar Negeri AS Colin Powell, Menteri Pertahanan AS Donald Rumsfeld, dan beberapa pejabat senior Badan Intelijen Pusat AS (CIA) membahas

... "Setelah Saddam diinjak, apa yang akan kita lakukan

Akhirnya, rencana tiga langkah mengerucut diantara mereka. Pertama, Irak akan diatur oleh militer AS. Tahap kedua, masa transisi dengan gubernur militer AS akan berkuasa berdampingan dengan pemerintahan sipil yang disepakati internasional. Tahap ketiga, pemerintahan akan diserahkan kepada rezim yang disukai dan berada dalam pemeliharaan AS.

Awalnya, bentuk pemerintahan Irak pasca perang akan serupa dengan rekonstruksi Jepang dibawah Jenderal Dauglas MacArthur. Namun, Deplu AS menganggap bentuk ini terlalu bersifat kolonialisme dan akan menyinggung negara-negara Arab. Akhirnya bentuk yang dipakai adalah de-nazi-fikasi di Jerman. Serupa dengan Nazi, partai Baath di Irak mendominasi berbagai fungsi administrasi negara. Menyingkirkan mereka semua akan mengakibatkan kelumpuhan sistem.

Akan tetapi, rekonsiliasi antara Sunni yang kuat, Syiah yang miskin, dan Kurdi yang semi merdeka diakui sangat sulit. Apalagi, tugas yang utama adalah meyakinkan masyarakat Irak bahwa pemerintahan yang baru bukan pemerintahan boneka Amerika Serikat.

“Ini problem serius karena yang akan muncul pertama adalah legitimasi dari pemerintahan itu sendiri. Apakah pemerintah itu aspiratif yaitu memperhatikan aspirasi masyarakat Irak yang heterogen,” ujar Riza Sihbudi.¹⁶ Problem lain adalah perbedaan pandangan antara AS dengan negara-negara Uni Eropa. Uni

16. Riza Sihbudi, “AS dan Peran AS dalam Memahami Peran

Karena itu diperkirakan akan muncul resistensi rakyat Irak, terutama yang menganggap ini adalah pemerintahan yang mewakili kepentingan AS, bukan kepentingan rakyat Irak. Pasca Invasi ini, tujuan utama AS adalah mengeksploitasi minyak karena dibutuhkan untuk biaya rekonstruksi. Dari situ akan muncul beragam persoalan karena di Irak sudah ada perusahaan- perusahaan minyak asing lain seperti Perancis dan Jerman yang menolak invasi AS.

Selain itu, kalau AS mengandalkan semacam pemilihan untuk menciptakan pemerintahan demokrasi, hal itu juga akan menciptakan problem. Sebab, komposisi masyarakat Irak terbesar adalah kelompok Syiah, hampir 58 persen, kelompok Sunni 17 persen, dan Kudi 20 persen. Kalau orang Syiah yang tampil sebagai penguasa, pasti tidak disukai AS.

Bagi AS, satu negara Syiah saja, yaitu Iran, sudah tidak pernah bersahabat dengan AS, apalagi jika muncul negara Syiah kedua, yaitu Irak. Demikian juga kalau Kurdi sebagai mayiritas yang kedua, menang dalam pemilu.

Pemerintahan boneka AS ini akan ditolak negara-negara tetangga Irak, terutama dari negara-negara yang sejak awal menentang perang, yaitu Syuriah dan Iran. Invasi AS ke Irak tetaplah dibenci oleh Iran. Iran yang beraliran Syiah, kendati Iran anti Saddam, belum tentu senang dengan kedatangan AS ke Irak.

b. Aspek-aspek Internasional Demokratisasi

Aspek-aspek internasional demokratisasi disini adalah menyangkut motivasi, metode serta hasil yang dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:¹⁷

..

Motivasi

Motivasi mendasar dan paling sederhana bagi promosi demokrasi adalah untuk memperluas bagi orang-orang di luar negeri manfaat dari sistem yang sangat dihargai di dalam negeri. Rakyat negara-negara demokratis yang telah mapan sangat percaya akan superioritas - baik secara moral dan praktis - bentuk pemerintahan mereka, dan sebagian besar akan sulit untuk meragukan bahwa dunia secara keseluruhan akan menjadi sebuah tempat yang lebih aman dan bahagia seandainya bentuk pemerintahan mereka itu dapat didirikan dimanamana.

Amerika Serikat memandang dirinya sebagai sebuah bangsa besar yang keberhasilannya ditemukan pada tradisi panjang demokrasi internal (dalam aspek-aspek penting yang dapat dilacak kembali ke awal kelahiran Republik tersebut) dan yang supremasi internasionalnya berkaitan dengan pengimplementasian demokrasi melalui kekuatan bersenjata, tidak hanya dalam satu kasus melainkan berulang-ulang. Dengan cara pandang mengenai sumber kekuatan Amerika dulu dan sekarang seperti itu, kebijakan-kebijakan berkenaan dengan “pengeksporan demokrasi” cenderung dilakukan dalam cara yang asertif dan percaya diri, dengan perhatian terbatas pada kalkulasi kompleks beragam kekuatan yang bersaing di negara bersangkutan.

Yang lebih penting adalah apakah dukungan domestik AS dapat diperoleh bagi kebijakan luar negeri tersebut. Untuk tujuan ini tak dibutuhkan kriteria khusus mengenai apa yang dimaksud sebagai “demokrasi”; namun pemerintah-

AS sebagai kekuatan global, dan pergerakan politik yang tidak mendukung cara pandang dunia AS, akan sulit memperoleh pengakuan di Washington sebagai “demokratis”, betapapun liberal praktik-praktik pemilihan ataupun filsafat politik mereka.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Amerika Serikat menjadi negara satu-satunya yang sering membanggakan diri sebagai negara *superpower* - bersamaan dengan surutnya kekuatan Inggris sebagai *majorpower* yang tidak hanya di Timur Tengah namun juga di tingkat internasional – negara yang selalu menunjukkan kekuatannya di mata dunia yang selalu mengintervensi urusan dalam negeri negara-negara lain, terutama negara-negara yang mempunyai kekuatan yang jauh lebih lemah apabila dibandingkan dengan kekuatan Amerika Serikat atau negara-negara yang dianggap sulit ditaklukkan oleh Amerika Serikat dan kemudian sebagai ancaman bagi kekuatannya seperti kebanyakan negara-negara yang terletak di Timur Tengah.

Namun demikian, penyerangan AS terhadap Irak pada 20 Maret 2003 dilancarkan dengan alasan yang sederhana, yaitu untuk menghancurkan senjata kimia, biologis, dan nuklir yang dimiliki oleh Irak. Penyerangan AS atas Irak mempunyai tujuan jangka panjang yang akan mempengaruhi peta politik militer, dan ekonomi AS di Timur Tengah khususnya dan diperbatasan dunia

Metode-metode

Pemerintah

Tentu telah menjadi jelas sekarang bahwa keragaman metode yang luas tersedia untuk membantu promosi demokrasi di Amerika Latin dan Eropa Selatan.¹⁸ Namun, telah jelas pula bahwa banyak dari metode-metode ini yang memiliki efek tak pasti, sejumlah darinya mungkin sangat tidak konsisten, dan semuanya sulit untuk diterapkan secara langgeng dalam waktu lama. Tambahan lagi, mengingat promosi demokrasi tak pernah lebih dari satu diantara serangkaian tujuan kebijakan luar negeri yang bersaing, metode-metode yang digunakan untuk memenuhi tujuan ini harus dievaluasi dengan mempertimbangkan dampaknya pada tujuan-tujuan lain pula. Bagan ini akan secara singkat mempertimbangkan peran pakta-pakta internasional, lingkup diplomasi dalam menginterpretasikan dan memodifikasi persyaratan-persyaratan pakta; serta berbagai aktivitas organisasi-organisasi non pemerintah.

Semua metode ini melibatkan transisi menuju demokrasi yang berani, namun tanpa secara langsung “mengintervensi” masalah-masalah internal dari negara-negara berdaulat lain di saat masa damai. Dalam praktik, batasan antara pelaksanaan pengaruh eksternal yang abash dan intervensi yang tak pantas adalah jauh lebih kabur daripada yang bersedia diakui kebanyakan pemerintah – satu

18. Untuk diskusi yang lebih mendalam mengenai metode-metode ini, lihat misalnya, ...

Sebuah metode yang akan efektif seandainya diterima sebagai non-intervensionis dapat menghasilkan efek bumerang seandainya dipandang sebagai campur tangan yang tidak sah. Metode-metode yang digunakan melawan Spanyol semasa Franco, pada 1946-1948 (pengucilan dari PBB, dan dari bantuan Marshall, penutupan wilayah, dukungan resmi – dan bahkan dalam sejumlah kasus pengakuan terhadap – pemerintah di pengasingan) mewakili mungkin upaya paling drastis untuk membangun redemokratisasi di dunia pada periode paska-perang, tanpa invasi langsung. Kampanye-kampanye mutakhir melawan pemerintah Sandinista di Nikaragua mungkin yang paling mendekati kasus itu. Metode tersebut gagal membuahkan hasil di Spanyol, dan setelah lebih dari empat tahun upaya serupa di Nikaragua belum juga menampakkan tanda-tanda bahwa itu akan mencapai tujuan yang ditetapkan – mengkonfirmasi cara pandang bahwa dalam masa damai faktor-faktor eksternal hanya memainkan peran sekunder dalam redemokratisasi.

Non-pemerintah

Diskusi tentang penataan pakta, paket bantuan, dan diplomasi resmi mencakup rentangan metode-metode langsung yang tersedia bagi pemerintah-pemerintah yang berhasrat untuk mendukung redemokratisasi. Namun demikian, terdapat pula sejumlah metode lain yang tersedia, yang dapat digunakan oleh organisasi-organisasi non pemerintah. Di sini kita perlu memprtimbangkan hanya aktivitas-aktivitas dari partai-partai politik barat, dan pada khususnya anggota

1. J. J. ... G. ... Internasional (SI). Tentu saja, terdapat berbagai

organisasi-organisasi di dalam proses politik AS yang menjalankan fungsi yang serupa dengan ODCA dan SI.

Namun demikian, mereka pada dasarnya adalah organisasi-organisasi berfokus-Washington sebagai kontras dari instrumen-instrumen multinasional yang dibangun partai-partai Eropa. Tak terdapat sebuah jawaban umum terhadap pertanyaan mana dari sistem-sistem ini yang lebih efektif dalam mendukung proses redemokratisasi. Itu akan sangat tergantung pada keadaan geopolitik dari masing-masing negara, dan pada konfigurasi spesifik dari kekuatan-kekuatan politik di Washington, atau didalam negara-negara Eropa tertentu pada saat yang bersangkutan.

SI terpilih untuk dikaji karena ia mungkin adalah wujud terpenting dari kooperasi partai-dengan-partai untuk memajukan demokrasi, dan juga karena sejarahnya relatif kurang dikaji dan mudah untuk disalahpahami. Pada 1958, SI berada pada puncak gelombang, tapi itu tidak berlangsung lama.

Pada tahun yang sama, terdapat pemilihan-pemilihan demokratis di Argentina, Brazil, Chile, Uruguay, dan Venezuela, dimana semua partai yang berkaitan dengan SI menunjukkan penampilan yang mengesankan. Tahun berikutnya, sebuah organisasi yang terkait secara longgar, Gerakan 26 Juli dibawah Castro, naik ke tampuk kekuasaan tidak melalui pemilihan umum

.....

Hasil

Tiga negara demokratis baru di Eropa selatan secara mengejutkan nampaknya telah memperoleh kemapaman mereka; sementara sebagian besar negara di Amerika Selatan juga mengalami proses redemokratisasi yang menakjubkan. Hanya Chile dan Paraguay yang tak terpengaruh di Amerika Selatan, dan di Eropa Selatan hanya Turki yang terbukti mengecewakan. Di pihak lain, di Amerika Tengah dan Karibia, gambarannya jauh kurang memuaskan. Pada titik ini, wilayah pengaruh Eropa nampak lebih baik daripada wilayah Amerika Serikat. Namun, adalah menyesatkan untuk menyimpulkan bahwa hasil-hasil yang lebih melegakan ini datang dari kebijakan dukungan Eropa terhadap demokratisasi yang lebih baik.

Dalam masa damai adalah proses internal dalam setiap negara yang terpenting dalam menentukan keberhasilan transisi demokratis, sementara dukungan eksternal hanya memiliki signifikansi sekunder. Amerika Serikat telah memberikan sejumlah pengaruh penting terhadap redemokratisasi Eropa; demikian pula, negara-negara Eropa telah memberikan sejumlah sumbangan bagi upaya-upaya Amerika Latin. Pada pertengahan 1940-an dan kembali di akhir 1950-an, prospek bagi demokrasi di kebanyakan wilayah Amerika Latin nampak jauh lebih baik daripada di Eropa Selatan.

Karena itu, pascainvasi ini, Irak penuh ketidakpastian karena masalahnya akan jauh lebih kompleks. Disatu sisi, AS menambah jumlah sekutu di Timur Tengah, tetapi hal ini menimbulkan konflik internal atau regional

Jika pascainvasi pemerintah di Irak militeristik, itu sama artinya bagi rakyat keluar dari mulut buaya masuk ke mulut macan. Dimana-mana pemerintahan militer tidak akan mentolerir oposisi. Sementara kalau sipil yang memimpin akan timbul masalah juga. Biasanya pemerintahan sipil akan sulit mengendalikan negara dalam masa transisi, terutama dalam komposisi yang heterogen.

Namun, pemerintahan militer akan diberlakukan untuk meredam resistensi keras, baik dari kelompok mayoritas Syiah maupun Kurdi. Apalagi keduanya tidak akan mendapat porsi pemerintahan pascainvasi. Dulu mereka anti-Saddam, tetapi sekarang mereka agak goyah dan lihat-lihat dulu. Ingat tahun 1991, ketika orang Kurdi dibasmi Saddam, AS diam saja.

Belum lagi kalau nanti negara-negara Eropa tidak kebagian dan mulai saling mendukung. Mereka mendukung Kurdi, Syiah atau syuriah untuk merongrong pemerintahan boneka AS yang berkuasa di Irak. Negara-negara Eropa sangat berkepentingan di Irak. Mereka menentang invasi bukan karena tidak setuju AS bertindak unilateral, tetapi karena proyek-proyek mereka terganggu.

Pergolakan yang lebih rumit di Irak dan kawasan Timur Tengah pada umumnya akan terus muncul. Berbagai konflik yang sudah ada seperti di Palestina akan lebih mengeras dan berkepanjangan. Inilah awal sekaligus ujung dari ketidakefektifan masa dengan kawasan itu.

F. Hipotesa

Demokratisasi yang ditawarkan Amerika ke Irak tidak akan tumbuh dan berkembang dengan baik jika Amerika terlalu turut campur dalam proses pembentukan pemerintahan baru Irak pasca invasi. Campur tangan Amerika ini akan memandulkan peran rakyat Irak serta akan mengadopsi pemikiran-pemikiran barat yang tidak sesuai dengan kehidupan rakyat Irak.

Namun, tidak dapat dipungkiri bila demokrasi yang dipromosikan Amerika ke Irak membawa angin perubahan bagi kehidupan rakyat Irak yang selama ini telah berada dalam kungkungan rezim Saddam yang bertangan besi. Kesadaran rakyat Irak untuk menentukan nasib bangsanya sendiri juga diperlukan agar proses demokratisasi ini dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

G. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini mencakup perkembangan pemerintahan Irak selama pasca invasi AS hingga saat ini, khususnya dikaitkan dengan proses demokratisasinya. Meskipun demikian tinjauan sejarah semenjak sebelum terjadinya serangan AS, khususnya pada masa pemerintahan Saddam, tidak dapat diabaikan untuk mengetahui dan memahami potensi demokrasi masyarakat Irak.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, penulisan ini akan dibagi atas lima bagian pembahasan, antara lain adalah :

Bab I : Berisi pendahuluan yang mengungkapkan mengenai latar belakang masalah, permasalahan, kerangka dasar teori yang digunakan, hipotesa, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan yang mengantarkan kita pada bab-bab selanjutnya.

Bab II : Dalam bab ini akan mendeskripsikan kondisi Irak pada masa pemerintahan Saddam sampai dengan masa pasca invasi AS. Deskripsi ini menyangkut faktor-faktor yang mendukung serta permasalahan yang terjadi pada era tersebut dalam usaha menuju negara demokratis.

Bab III : Dalam bab ini akan dikemukakan tentang motivasi-motivasi Amerika Serikat dalam melakukan invasi ke Irak serta metode yang digunakannya untuk mempromosikan demokrasi di Irak serta upayanya dalam menjaga eksistensinya di dunia sebagai negara yang *super power*.

Bab IV : Dalam bab ini berisi mengenai langkah-langkah Amerika dalam pembentukan rezim demokratis di Irak, kemudian hambatan-hambatan dalam usahanya untuk membentuk rezim yang demokratis untuk memprediksi prospek demokrasi di Irak dibawah pemerintahan Irak yang baru pasca invasi 20 Maret 2003 oleh Amerika Serikat.

Bab V : Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh